



BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Organisasi Non Pemerintah (*Non Governmental Organization*), Lembaga Swadaya Masyarakat (*Self Help Organization*), Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (*Self Help Sponsored Organization*) dan Organisasi Nirlaba (*Non Profit Organization*), telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir ini untuk menjawab tuntutan masyarakat dunia agar masyarakat dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk penanggulangan dampak negatif pembangunan di berbagai negara berkembang.

Dewasa ini di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pembangunan masyarakat yaitu Organisasi Non Pemerintah yang berasal dari negara donor (*donor NGOs*) dan Organisasi Non Pemerintah yang berasal dari negara penerima donasi (*local NGOs*). Organisasi Non Pemerintah lokal ini meliputi banyak organisasi, termasuk organisasi Pengembangan Swadaya Masyarakat (*Self Help Sponsored Organization SHPO*), disamping itu terdapat juga organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, seperti serikat pekerja, organisasi wanita dan pemuda, dan masih banyak lagi.

Dengan berkembangnya organisasi kemasyarakatan tersebut, timbul kebutuhan untuk meningkatkan pengendalian kinerja dalam menjalankan organisasi tersebut. Terlebih lagi, sebagai organisasi kemasyarakatan dimana

pendanaan berasal dari lembaga donor, pengendalian kinerja mutlak diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana.

Pada dasarnya, tujuan organisasi nirlaba diarahkan pada manfaat ekonomis, sosial, pendidikan atau spiritual dari masing-masing individu atau golongan yang tidak mempunyai kepentingan dalam bentuk pemilikan atau investasi pada organisasi semacam itu. Para direktur utama, dewan direktur, perwalian atau pejabat-pejabat administratif sebagaimana halnya dengan rekan mereka pada perusahaan yang mencari laba, dibebani dengan tugas pengelolaan terhadap sumber daya ekonomi. Organisasi nirlaba hendaknya menerapkan metode dan prosedur dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian biaya secara efektif dan memadai.

Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian kinerja pada organisasi nirlaba adalah dengan *Standard Ratio*. Faktor-faktor penting dalam mengendalikan hasil kegiatan atau kinerja (*performance*) adalah dengan jalan membandingkannya dengan suatu patokan tepat. Faktor-faktor tersebut harus dipertimbangkan dengan wajar dalam mengadakan perbandingan posisi suatu organisasi. Analisis dengan menggunakan angka-angka rasio tidak banyak artinya, apabila tidak dinilai dengan menggunakan patokan yang tepat yaitu dengan *Standard Ratio*.

Pada organisasi nirlaba non pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*Voluntary Health and Welfare Organization*), kegiatan yang dilaksanakan merupakan implikasi dari program yang ada. Dimana program ini didanai oleh lembaga donor tertentu yang menaruh

perhatian pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkualitas guna meningkatkan efektivitas program. Hal ini memerlukan keakuratan dalam pembebanan biaya. Terlebih lagi *performance* organisasi nirlaba akan mempunyai nilai lebih bagi lembaga donor apabila pengalokasian biaya untuk program lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total anggaran. Maka, *standard ratio* dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja agar tidak terjadi *distorsi biaya*. Distorsi biaya adalah pembebanan biaya yang terlalu tinggi (*overstated* atau *overrun*) atau terlalu rendah (*understated* atau *underrun*) pada suatu objek biaya. Distorsi biaya mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan dan pengendalian. Dengan terhindarnya dari distorsi biaya, maka dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana.

Selama ini, Pact Indonesia tidak menetapkan *standard ratio* tertentu dalam pembebanan biaya setiap objek dalam anggaran program antara *activity cost* dan *operational cost*. Begitu pula dalam hal penilaian kinerja program-programnya. Pembebanan biaya pada setiap objek biaya hanyalah berdasarkan kebutuhan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan kegiatan suatu program. Hal ini memungkinkan terjadinya distorsi biaya, yang berarti dapat mengurangi efektivitas pengelolaan dana.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa dan memberikan saran bagi manajemen Pact Indonesia dalam bentuk skripsi yang berjudul " STANDARD RATIO SEBAGAI ALAT BANTU PENGENDALIAN DANA PADA ORGANISASI NIRLABA PACT

INDONESIA ".

1.2 Perumusan Masalah

Tidak adanya *standard ratio* dalam pembebanan biaya antara *activity cost* dan *operational cost* dapat memungkinkan kendornya pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh organisasi nirlaba serta kinerja program-program yang ada. Oleh karena itu, permasalahannya adalah pada peranan *standard ratio* sebagai alat pengendalian kinerja yang secara nyata diperlukan manajemen Pact Indonesia guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peranan *standard ratio* sebagai alat pengendalian kinerja guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pada organisasi nirlaba Pact Indonesia di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah dikemukakan diatas, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat:

- Bagi manajemen Pact Indonesia, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan pengelolaan dana, guna mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sudah dilaksanakan selama ini.
- Bagi penulis, penelitian ini semakin mendorong untuk lebih memahami dan mendalami teori-teori yang selama ini diperoleh untuk diterapkan dalam praktek yang sebenarnya.

- Bagi pembaca, dapat dipakai sebagai literatur dalam pembuatan skripsi lainnya.

1.5 Sistematika Skripsi

Pada Skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut, yang terdiri dari

Bab 1 Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Skripsi

Bab 2 Landasan Teori, yang memuat Laporan Keuangan, Analisa Laporan keuangan, Analisa Rasio, Hakekat Pengendalian Manajemen, dan Organisasi Nirlaba

Bab 3 Metodologi Penelitian yang terdiri dari tiga sub bab yakni Penjelasan Judul, Jenis Dan Sumber data, serta Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Bab 4 Analisis dan Pembahasan Masalah untuk menyelesaikan permasalahan terdiri dari Gambaran Umum Organisasi, Deskripsi Data, Analisis Rasio dan Pembahasan

Bab5 Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan yang diambil penulis dari pembahasan beserta sumbangan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama Pact Indonesia.